

EVALUASI PENERAPAN ‘SAK ETAP’ PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CIPTA CEMERLANG INDONESIA

THE EVALUATION OF ‘SAK ETAP’ APPLICATION IN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CIPTA CEMERLANG, INDONESIA

¹Priscilia Christina Sumendap, ²David P. E. Saerang, ³Novi S. Budiarmo

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email: ¹prisciliasumendap@yahoo.com; ³novi_sbudiarmo@yahoo.com

ABSTRAK

Akuntansi bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang memberikan pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun eksternal atas suatu kegiatan bisnis. Laporan keuangan berisi informasi yang menyangkut posisi keuangan dan bertujuan untuk membantu entitas dalam pengambilan keputusan. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) hadir untuk membantu kebutuhan BPR yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan SAK ETAP pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cipta Cemerlang Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, namun masih terjadi inkonsistensi dan belum mematuhi SAK ETAP secara sepenuhnya dalam penyajian laporan keuangan. Penelitian ini menyarankan agar BPR lebih teliti agar tidak terjadi inkonsistensi penyajian laporan keuangan.

Kata Kunci: Laporan Keuangan, SAK ETAP, BPR

ABSTRACT

Accounting aims to generate financial reports that provide accountability to internal and external parties on a business activity. Financial report contains information concerning the financial position and aims to assist entities in decision making. Financial Accounting Standards Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) was present to assist the needs of rural banks that do not have significant public Accountability and publish general purpose financial statements for external users. This study aims to evaluate the application of SAK ETAP in PT. Rural Bank Cipta Cemerlang Indonesia. The method used in this research is a comparative descriptive analysis. Results show that the company has implemented financial financial statements in accordance with applicable standards, but it still happens inconsistency and has not adhere to SAK ETAP is fully in preparing the financial statements. This study suggested that more careful BPR to avoid inconsistency financial statement presentation.

Key Words: Financial Statement, SAK ETAP, BPR

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Laporan keuangan bertujuan untuk menghasilkan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan. Menurut Pontoh (2013:23) laporan keuangan adalah menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Melihat pentingnya laporan keuangan dalam menilai kesehatan perusahaan, maka laporan keuangan harus disusun secara cermat dan terbebas dari bias. Laporan keuangan harus dapat diinterpretasikan oleh para pihak yang memiliki kepentingan dengan persepsi yang sama. Untuk itu perlu adanya suatu standar akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan suatu entitas.

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia terdiri atas 4 pilar, yaitu Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, SAK ETAP, SAK Syariah, Standar Akuntansi Pemerintah. SAK umum berlaku bagi perusahaan yang memiliki akuntabilitas yang signifikan. Namun entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Salah satu entitas yang mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu Bank Perkreditan Rakyat.

Standar Akuntansi Keuangan ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2009 oleh Ikatan Akuntan Indonesia. SAK ETAP diperuntukkan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan hanya menerbitkan laporan keuangan bertujuan umum. SAK ETAP memberikan banyak kemudahan bagi BPR dibandingkan dengan SAK umum yang memiliki ketentuan dan pelaporan yang cukup kompleks. PT. BPR Cipta Cemerlang Indonesia merupakan entitas yang bergerak dibidang perbankan dan mendapatkan izin dari badan regulasi terkait yakni OJK untuk menggunakan SAK ETAP dalam pelaporan keuangan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan mengevaluasi penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Akuntansi

Akuntansi dipandang sebagai bahasa yang universal dalam dunia bisnis. Akuntansi merupakan proses yang mencapai puncaknya pada saat penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan yang digunakan untuk keperluan eksternal dan internal (Kieso *et al*, 2011:5).

Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi adalah proses akuntansi yang dimulai dengan menganalisis dan menjurnal transaksi kemudian berakhir dengan neraca saldo setelah penutupan buku (Warren *et al*, 2009:156).

Metode Pencatatan Akuntansi

Definisi menurut Ardiyos (2008:166) pengertian *cash basis accounting method* (metode akuntansi dasar kas) adalah suatu metode akuntansi dimana biaya/pendapatan dicatat saat dibayar/diterima tanpa menghubungkan dengan periode untuk kapan biaya/pendapatan terjadi. Suatu system akuntansi dimana biaya pendapatan ditetapkan pada waktu uangnya dibayar/diterima.

Definisi *acrual basis accounting method* menurut Ardiyos (2008:19) adalah suatu metode akuntansi yang mencatat atau mengakui beban maupun pendapatan saat terjadinya, yaitu beban dicatatnya pada saat barang atau jasa diterima sedang pendapatan dicatat pada saat barang atau jasa diserahkan tanpa menghiraukan saat pengeluaran maupun penerimaan dari yang bersangkutan.

Laporan Keuangan

Kieso (2011:5) laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan.

Tujuan Laporan Keuangan

Menurut IAI dalam SAK ETAP (2009:2) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.

Sementara menurut Kasmir (2010:10) tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan.
8. Memberikan informasi keuangan lainnya.

Pengguna Laporan Keuangan

Secara umum, dapat dikatakan bahwa, pengguna informasi akuntansi dapat berasal dari internal maupun eksternal suatu organisasi dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda. Adapun laporan keuangan eksternal diuraikan oleh Marisi Purba (2009:34-35) sebagai berikut:

1. Penanam Modal. Penanam modal atau investor dan penasihatnya berkepentingan dengan resiko yang melekat pada investasi mereka dan informasi terkait dengan besarnya laba perusahaan sangat menentukan besarnya dividen yang akan mereka peroleh. Dari informasi keuangan yang mereka peroleh, mereka mengambil keputusan apakah tetap berinvestasi atau menarik investasi yang telah dilakukan.

2. Pemberi Pinjaman. Pemberi pinjaman terutama bank, tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengetahui apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar oleh perusahaan pada saat jatuh tempo.
3. Masyarakat. Perusahaan memengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (*trend*) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.
4. Pemerintah dan badan regulator lainnya. Pemerintah dan badan regulator lainnya berkepentingan terhadap aktivitas perusahaan. Pemerintah dan badan regulator lainnya membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Lembaga Negara selain pemerintah yang berkepentingan atas laporan keuangan adalah Bank Indonesia. Dalam melakukan analisis *Capital Adequacy Ratio (CAR)* secara nasional, BI mengumpulkan informasi dari laporan keuangan bank yang dilaporkan secara berkala.
5. Pemasok dan kreditur usaha lainnya. Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada perusahaan dengan tanggung waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman. Jika perusahaan adalah pelanggan utama mereka, maka mereka berkepentingan untuk mengetahui kelangsungan hidup perusahaan.
6. Pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan perusahaan atau dengan kata lain sangat bergantung pada keberadaan perusahaan.
7. Karyawan. Karyawan berkepentingan melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pension dan kesempatan kerja.

Menurut Winston Pontoh (2013:5) pihak internal yang dimaksudkan, yaitu pihak manajemen dari organisasi merupakan pemakai utama, dimana dengan memperoleh informasi akuntansi, dapat menjalankan fungsi-fungsi dasarnya, yaitu pembiayaan, investasi, operasi dan produksi, pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia, dan penyediaan informasi.

Keterbatasan Laporan Keuangan

Munawir (2010:9) menyatakan bahwa laporan keuangan memiliki keterbatasan antara lain:

1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan interim report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara) dan bukan merupakan laporan final.
2. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu.
3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu.
4. Laporan keuangan tidak mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang.

SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK ETAP hadir sebagai jawaban akan kebutuhan standar akuntansi keuangan yang dapat diterapkan oleh bank perkreditan rakyat dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan.

IAI dalam SAK ETAP (2009:1) menyatakan bahwa entitas yang diijinkan menerapkan SAK ETAP pada pelaporan keuangannya adalah entitas yang:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*).

Laporan Keuangan Lengkap

Laporan keuangan lengkap menurut IAI dalam SAK ETAP meliputi:

1. Neraca;
2. Laporan laba rugi;
3. Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan:
 1. Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
 2. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
4. Laporan arus kas; dan
5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut Pedoman Akuntansi BPR, penyajian laporan keuangan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas dan arus kas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.
3. Laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya yang dikelompokkan secara berjenjang dari kegiatan utama BPR dan kegiatan lainnya.
4. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian usaha sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam CALK berkaitan dengan pos-pos dalam neraca sesuai dengan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas yang sifatnya memberikan penjelasan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontijensi serta transaksi-transaksi lainnya.

Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat atau yang biasa disingkat BPR adalah lembaga keuangan yang bergerak dibidang jasa UMKM. BPR merupakan lembaga perbankan di bawah pengawasan Bank Indonesia. Dalam hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi Negara dalam perekonomian dengan berbagai sumber daya alam yang begitu melimpah dan jumlah penduduk yang cukup besar. Namun pemerataan ekonomi belum sepenuhnya tercapai. Masih ada masyarakat menengah ke bawah diberbagai daerah yang kehidupan ekonominya masih rendah. Disinilah peran BPR sangat membantu dalam penyerapan lapangan kerja untuk peningkatan perekonomian masyarakat pada sector ekonomi mikro. Sesuai peraturan pemerintah tentang BPR berdasarkan Undang-undang

No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998.

Pemerintah pun sangat mendukung BPR sebagai ujung tombak bagi kemajuan pemerataan ekonomi di daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi mikro. Ini ditunjukkan langsung oleh pemerintah dengan dukungan kepada BPR untuk terus meningkatkan ekonomi pada sektor UKM/UMKM dan memberi kemudahan dalam peraturan undang-undang pemerintah mengenai BPR.

Penelitian Terdahulu

1. Rudiantoro dan Siregar (2010) dengan penelitian mengenai Kualitas Laporan Keuangan UMKM serta Prospek Implementasi SAK ETAP yang bertujuan untuk menguji dampak kualitas laporan keuangan UMKM pada tingkat kredit yang diterima UMKM. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Kualitas laporan keuangan UMKM tidak memengaruhi jumlah kredit yang diterima UMKM. Terdapat persamaan dalam penelitian ini yakni Penelitian sebelumnya menganalisis implementasi SAK ETAP pada laporan keuangan UMKM, sedangkan perbedaan terletak pada data yang diperoleh.
2. Wongkar (2015) dengan penelitian mengenai Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Utara yang bertujuan Untuk mengetahui kinerja keuangan PT. BPR Nusa Utara diukur dengan menggunakan Rasio Keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan Kinerja keuangan PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusa Utara mengalami peningkatan dari tahun 2012, 2013, dan 2014. Terdapat persamaan dalam penelitian ini yakni Penelitian sebelumnya menganalisis kinerja keuangan pada PT. BPR Nusa Utara, sedangkan perbedaan terletak pada metode penelitian.

2. METODELOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian deskriptif-komparatif dimana peneliti mengumpulkan, menganalisa serta membandingkan penyajian laporan keuangan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia dengan SAK ETAP yang berlaku.

Tempat dan Waktu Penelitian

Objek penelitian ini dilaksanakan di Manado yakni PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia. BPR ini berlokasi di Jalan Sarapung Ruko sarapung No. 5, Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian yang dibutuhkan kurang lebih 3 (tiga) bulan yang meliputi kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi latar belakang masalah penelitian
2. Merumuskan masalah dan menentukan tujuan dari penelitian serta manfaat penelitian
3. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum BPR dan data mengenai penyajian laporan keuangan
4. Melakukan analisis dan mengevaluasi data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif-komparatif.

5. Mengajukan kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian dan memberikan saran pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia .

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas:

1. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka (non-numerik). Data kualitatif diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi.
2. Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan (*numeric*).

Jenis data kualitatif yang dibutuhkan berupa profil BPR, alur proses pemberian kredit maupun deposito, pemasaran produk kredit dan deposito, serta uraian singkat mengenai siklus akuntansi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia. Sedangkan jenis data kuantitatif berupa laporan keuangan pada tahun 2012 dan 2013.

Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yakni berupa laporan keuangan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia tahun 2012 dan 2013.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Dokumentasi. Beberapa dokumen dan arsip yang relevan yang dapat dibuat dari catatan atau dokumen yang ada seperti profil perusahaan dan laporan keuangan.
2. Interview. Metode ini dilakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode:

1. Deskriptif. Metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi masalah yang dihadapi.
2. Komparatif. Metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan teori-teori dan standar yang berlaku yakni Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dengan praktik yang terjadi di dalam BPR, kemudian mengambil kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan untuk membantu pertumbuhan ekonomi daerah agar lebih berkembang untuk kemajuan bersama. BPR memberikan produk-produk dalam bentuk kredit maupun tabungan dan deposito. “Menjadi Bank Terdepan Dalam Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” merupakan visi dari BPR. Dengan Misi “Memberikan Pelayanan yang Berkualitas kepada Masyarakat oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Guna Meningkatkan Kesejahteraan Bersama” dipimpin oleh Komisaris Utama Tuan Victor Danny Wangkar dan Komisaris Tuan Corneles Tumampas serta dipimpin oleh Direktur Utama Nona Audrey Winny Wangkar dan Direktur Nyonya Prilia Ursula Sondakh. Di tahun 2010 tanggal 5 Juni berdasarkan akta No. 09 dihadapan Nyonya Kartika SH. M.Kn pengganti dari Kun Hidayat SH, notaris di Jakarta telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan surat No. AHU-3391. AH. 01. 01 Tahun 2010 tanggal 07 Juli 2010. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami perubahan dengan akta No. 56 tanggal 20 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Threesje Sembung, SH., MH. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) terbagi atas 4000 lembar saham masing-masing saham bernilai Rp. 1.000.000,-. Modal dasar yang ditempatkan dan disetor penuh adalah Rp. 1.000.000.000,- sebanyak 1000 saham seluruhnya.

Kebijakan Akuntansi Perusahaan

Kebijakan akuntansi yang dapat terlihat dari laporan keuangan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia, yaitu:

1. Dasar Pengukuran Aset Tetap dan Inventaris. Semua aset tetap dan inventaris disajikan berdasarkan nilai perolehan.
2. Metode Penyusutan aset tetap. BPR menerapkan metode garis lurus (*straight line method*) sebagai dasar perhitungan penyusutan aset tetap).
3. Pengakuan Pendapatan dan Beban. Pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya atau menggunakan dasar akrual (*accrual basis*)

Neraca

SAK ETAP yang diadaptasi oleh BPR mensyaratkan pos-pos minimal yang perlu ada pada neraca. Berikut ini daftar centang pos-pos pada Neraca BPR.

**Tabel 1. Checklist Pos-pos pada Neraca section Aktiva
PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia**

No.	Pos Pada Neraca	Ada/Tidak
1.	Kas	
2	Kas dalam valuta asing	×
3	Sertifikat Bank Indonesia	×
4	Pendapatan bunga yang akan diterima	
5	Penempatan pada bank lain	
6	Kredit	
7	Agunan yang diambil alih	
8	Aset tetap dan inventaris	
9	Aset tidak berwujud	
10	Aset lain-lain	

Sumber: Data Olahan 2015

**Tabel 2. Checklist Pos-pos pada Neraca section Kewajiban
PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia**

No.	Pos Pada Neraca	Ada/Tidak
1.	Kewajiban segera	
2	Utang Bunga	
3	Utang Pajak	
4	Simpanan	
5	Simpanan dari Bank lain	
6	Pinjaman diterima	
7	Dana setoran modal – kewajiban	×
8	Kewajiban imbalan kerja	×
9	Pinjaman subordinasi	×
10	Modal pinjaman	
11	Kewajiban lain-lain	

Sumber: Data Olahan 2015

Tabel 3. Checklist Pos-pos pada Neraca section Ekuitas PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia

No.	Pos Pada Neraca	Ada/Tidak
1.	Modal	
2	Dana Setoran Modal – Ekuitas	
3	Laba/Rugi yang belum direalisasi	
4	Surplus revaluasi Aset Tetap	×
5	Saldo laba	

Sumber: Data Olahan 2015

Tabel 1 menunjukkan bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia telah mencantumkan 8 dari 10 pos-pos yang ada pada neraca aset, selanjutnya pada tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat 8 dari 11 pos-pos minimal yang harus ada pada neraca kewajiban dan yang ditunjukkan oleh tabel 3 sedikitnya ada 4 dari 5 pos-pos pada neraca ekuitas yang harus ada pada neraca. Tidak adanya pos-pos pada neraca tersebut karena tidak ada transaksi yang terjadi yang menyebabkan timbulnya pos-pos tersebut. Pos-pos yang disebutkan merupakan yang disyaratkan oleh Bank Indonesia dimana acuan penyusunannya berdasarkan SAK ETAP dan perundang-undangan yang relevan dengan BPR.

Laporan Laba Rugi

Informasi yang disajikan pada laporan laba rugi memiliki syarat minimal pos-pos seperti yang tertera pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Checklist Pos-pos pada Laporan Laba Rugi PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia

No	Pos pada Laporan Laba Rugi	Ada/Tidak
1	Pendapatan Operasional	
2	Beban Operasional	
3	Pendapatan Non-Operasional	
4	Beban Non-Operasional	
5	Beban Pajak Penghasilan	

Sumber: Data Olahan 2015

Berdasarkan tabel 4 terdapat seluruh pos yang disyaratkan oleh SAK ETAP. Pada Laporan Laba Rugi PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia terjadi transaksi yang menyebabkan munculnya seluruh pos yang disyaratkan oleh Bank Indonesia yang dasar acuan penyusunannya adalah SAK ETAP.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas BPR yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset netto atau kekayaan BPR selama periode pelaporan.

Tabel 5. Checklist Pos-pos pada Laporan Perubahan Ekuitas PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia

No	Pos pada Laporan Perubahan Ekuitas	Ada/Tidak
1	Modal saham	
2	Laba/Rugi yang belum direalisasi	
3	Surplus revaluasi aset tetap	×
4	Dana setoran modal – ekuitas	
5	Saldo laba	

Sumber: Data Olahan 2015

Tabel 5 menunjukkan bahwa telah tercantum 4 dari 5 pos pada laporan perubahan ekuitas PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia yang disyaratkan oleh Bank Indonesia yang dasar acuan penyusunannya adalah SAK ETAP. Surplus revaluasi aset tetap tidak ditemukan oleh BPR selama periode 2013 dan 2012.

Laporan Arus Kas

Tabel 6. Checklist Pos-pos pada Laporan Arus Kas Aktivitas Operasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia

No	Pos pada Laporan Perubahan Ekuitas	Ada/Tidak
1	Laba Neto	
2	Penyusutan aset tetap	
3	Penyisihan kerugian	
4	Amortisasi	
5	Penurunan nilai AYDA	
6	Laba penjualan aset tetap	×
7.	Selisih kurs valuta asing	×
8	Perubahan aset dan kewajiban operasi	

Sumber: Data Olahan 2015

Tabel 7. Checklist Pos-pos pada Laporan Arus Kas Aktivitas Investasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia

No	Pos pada Laporan Perubahan Ekuitas	Ada/Tidak
1	Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	
2	Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	
3	Pembelian/penjualan Sertifikat Bank Indonesia	×

Sumber: Data Olahan 2015

Tabel 8. Checklist Pos-pos pada Laporan Arus Kas Aktivitas Pendanaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia

No	Pos pada Laporan Perubahan Ekuitas	Ada/Tidak
1	Penerimaan/Pembayaran pinjaman subordinasi	
2	Penerimaan/Pembayaran modal pinjaman	×
3	Pembayaran dividen	×

Sumber: Data Olahan 2015

Pada Laporan Arus Kas PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia, berdasarkan tabel 6 telah tercantum 6 dari 5 pos untuk aktivitas operasi, pada tabel 7 terdapat 2 dari 3 pos untuk aktivitas investasi, dan pada tabel 8 menunjukkan 1 dari 3 pos untuk aktivitas pendanaan yang disyaratkan oleh Bank Indonesia yang dasar acuan penyusunannya adalah SAK ETAP.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tabel 9. Checklist Unsur-unsur pada Catatan atas Laporan Keuangan Bagian A PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia

No	Unsur-Unsur Catatan Atas Laporan Keuangan	Ada/Tidak
A	Gambaran Umum	
1	Pendirian	
2	Riwayat Ringkas	
3	Nomor dan tanggal akta pendirian serta perubahan terakhir, pengesahan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan atau nomor dan tanggal Berita Negara yang bersangkutan	
4	Bidang usaha utama sesuai anggaran dasar dan kegiatan	
5	Tempat berkedudukan dan lokasi utama kegiatan usaha	
6	Tanggal mulai beroperasi.	
7	Kepemilikan, berupa nama pemilik, besaran, dan komposisi kepemilikan.	
8	Direksi, Komisaris dan Karyawan	

Sumber: Data Olahan 2015

**Tabel 10. Checklist Unsur-unsur pada Catatan atas Laporan Keuangan Bagian B
PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia**

No	Unsur-Unsur Catatan Atas Laporan Keuangan	Ada/Tidak
B	Ikhtisari Kebijakan Akuntansi	
1	Pernyataan bahwa BPR menggunakan SAK ETAP	
2	Dasar Pengukuran dan penyusunan laporan keuangan	
3	Kebijakan akuntansi	

Sumber: Data Olahan 2015

**Tabel 11. Checklist Unsur-unsur pada Catatan atas Laporan Keuangan Bagian C
PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia**

No	Unsur-Unsur Catatan Atas Laporan Keuangan	Ada/Tidak
C	Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan	
1	Transaksi hubungan istimewa	
2	Perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan	
3	Komitmen dan Kontijensi	
4	Informasi Penting lainnya	
5	Peristiwa setelah tanggal neraca	
6	Perkembangan terakhir SAK ETAP dan peraturan lainnya	
7	Reklasifikasi	×

Sumber: Data Olahan 2015

Berdasarkan tabel 9, tabel 10 dan tabel 11, Catatan Atas Laporan Keuangan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia mencakup semua unsur yang diperlukan di dalam sebuah Catatan Atas Laporan Keuangan kecuali unsur reklasifikasi. BPR tidak memuat reklasifikasi dalam catatan atas laporan keuangan. Reklasifikasi dimuat oleh KAP dalam *management letter* kepada BPR.

Pembahasan

SAK ETAP menuliskan bahwa ada 5 jenis laporan yang harus dimiliki oleh entitas sehingga laporan keuangan dapat dikatakan lengkap. Berikut ini adalah daftarnya:

**Tabel 12 Checklist Kelengkapan Laporan Keuangan
PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia**

No	Elemen Laporan Keuangan	Ada/Tidak
1	Neraca	
2	Laporan Laba Rugi	
3	Laporan Perubahan Ekuitas yang juga menunjukkan: 1. Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau 2. perubahan ekuitas selain perubahan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik	
4	Laporan Arus Kas	
5	Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya	

Sumber: Data Olahan 2015

Berdasarkan tabel 12 Bank Perkreditan Rakyat dalam hal ini PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia dapat menunjukkan kelengkapan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan telah lengkap menurut SAK ETAP. Entitas yang menyatakan kepatuhannya terhadap SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh pada Catatan Atas Laporan Keuangan BPR. PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia telah dan sudah dapat menunjukkan pernyataan tersebut karena BPR telah membuat Catatan Atas Laporan Keuangan. Tetapi BPR belum mencantumkan reklasifikasi yang terjadi di dalam laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan. Padahal perusahaan menyatakan

bahwa telah mendapatkan koreksi reklasifikasi dari KAP. Melalui KAP, koreksi reklasifikasi disajikan di dalam *management letter*.

SAK ETAP mengatur penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. Pos-pos ini harus disajikan pada pengelompokan yang konsisten. Jika terjadi relasifikasi, maka hal tersebut harus diungkapkan oleh perusahaan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam hal ini, terjadi inkonsistensi pada Laporan Arus Kas PT. BPR Cipta Cemerlang Indonesia. Pada tahun 2012, BPR hanya menjumlahkan arus kas neto aktivitas operasi dari aktivitas operasi. Namun pada tahun 2013, BPR menjumlahkan arus kas neto aktivitas operasi dari aktivitas operasi dan laba neto. Jika terjadi perubahan dalam penyajian pos pada laporan keuangan maka hal ini perlu diungkapkan oleh perusahaan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, namun hal ini belum dilakukan oleh PT. BPR Cipta Cemerlang Indonesia.

4. PENUTUP

Kesimpulan

PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia lewat KAP sudah menerapkan SAK ETAP. Hal ini berdasarkan SAK ETAP yang mensyaratkan laporan keuangan yang lengkap terdiri atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun, PT. Bank Perkreditan Rakyat belum sepenuhnya mematuhi SAK ETAP karena tidak adanya pengungkapan reklasifikasi pada catatan atas laporan keuangan. Peneliti menemukan adanya inkonsistensi penyajian pada laporan arus kas BPR tahun 2013 dan 2012. Hal ini berdasarkan Laporan Arus Kas 2013 dan 2012 pada *section* aktivitas operasi.

Saran

Saran yang diberikan dari penelitian ini yaitu BPR lebih teliti lagi dalam penyajian laporan keuangan agar terhindar dari inkonsistensi penyajian dan BPR sebaiknya mencantumkan juga reklasifikasi pada Catatan Atas Laporan Keuangan agar laporan keuangan yang disajikan jelas sehingga dapat dipahami, relevan, diandalkan dan dapat dibandingkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Ardiyos, 2008. *Kamus Besar Akuntansi*. Citra Harta Prima, Jakarta.
- [2] Bank Indonesia. 2010. *Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat*. Tim Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat, Jakarta.
- [3] Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta.
- [4] Kasmir. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [5] Kieso, Donald., Jerry Weygandt., Terry Warfield. 2011. *Intermediate Accounting I, IFRS Edition*. John Wiley & Sons. Inc., USA.
- [6] Munawir, S. 2010. *Analisa Laporan Keuangan (Edisi 4)*. Liberty, Yogyakarta. Pemerintah Republik Indonesia. 1998. *Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan*. Jakarta.
- [7] Pontoh. 2013. *Akuntansi: Konsep & Aplikasi*. Halaman Moeka. Jakarta.
- [8] Purba, Marisi. 2010. *International Financing Reporting Standards, Konvergensi & Kendala Aplikasinya di Indonesi*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- [9] Reeve, James., Carl S. Waren., Jonathan Duchac. 2009. *Principles of Accounting, 23rd Edition*. South-Western Cengage Learning, China.